



**MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
SEKTOR KONTRUKSI
SUB SEKTOR PENGEMBANGAN WILAYAH
JABATAN KERJA AHLI MUDA
PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA**

**IDENTIFIKASI DAN PENERAPAN NORMA,
STANDAR, PEDOMAN, KRITERIA
DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
WILAYAH DAN KOTA**

**KODE UNIT KOMPETENSI:
F45.PW02.001.01**

BUKU KERJA



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI**
Jalan Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jumat – Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan dengan bidang kerjanya. Berbagai upaya ditempuh, baik melalui pendidikan formal, pelatihan secara berjenjang sampai pada tingkat pemagangan di lokasi proyek atau kombinasi antara pelatihan dan pemagangan, sehingga tenaga kerja mampu mewujudkan standar kinerja yang dipersyaratkan di tempat kerja.

Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan salah satu institusi pemerintah yang ditugasi untuk melakukan pembinaan kompetensi, secara bertahap menyusun standar-standar kompetensi kerja yang diperlukan oleh masyarakat jasa konstruksi. Kegiatan penyediaan kompetensi kerja tersebut dimulai dengan analisa kompetensi dalam rangka menyusun suatu standar kompetensi kerja yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi tenaga kerja di bidang jasa konstruksi yang bertugas sesuai jabatan kerjanya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya.

Penyusunan Modul Pelatihan (Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi) untuk jabatan kerja **Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota** mengacu kepada SKKNI Ahli Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota, yang dalam penjabarannya kepada program pelatihan tertuang pada Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK). Penyusunan KPBK dilakukan dengan mengidentifikasi Unit-unit Kompetensi melalui analisis terhadap Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang merupakan dasar rumusan penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan.

Modul ini merupakan salah satu sarana dasar yang digunakan dalam pelatihan sebagai upaya memenuhi kompetensi standar seorang pemangku jabatan kerja seperti tersebut diatas, sehingga dimungkinkan adanya tambahan materi-materi lainnya untuk lebih meningkatkan kompetensi dari standar yang dipersyaratkan setiap jabatan kerja

Penyusunan modul ini melalui beberapa tahapan diantaranya Focus Group Discusion serta Workshop yang melibatkan para nara sumber, praktisi, pemangku jabatan serta stakeholder. Dengan keterbatasan pelibatan stakeholder terkait dalam proses penyusunan modul ini, dan seiring dengan perkembangan dan dinamika teknologi konstruksi kedepan, maka tetap diupayakan penyesuaian dan perbaikan secara berkelanjutan sejalan dengan dilaksanakannya pelatihan dengan menggunakan modul ini dilapangan melalui respon peserta pelatihan, instruktur, asesor serta semua pihak.

Pada kesempatan ini disampaikan banyak terimakasih kepada tim penyusun yang telah mencurahkan segala kemampuannya sehingga dapat menyelesaikan modul ini, serta semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan modul pelatihan ini.

Jakarta, Nopember 2012

PUSAT PEMBINAAN
KOMPETENSI DAN PELATIHAN
KONSTRUKSI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	1
BAB I STANDAR KOMPETENSI	2
1.1 Kode Unit.....	2
1.2 Judul Unit.....	2
1.3 Deskripsi Unit	2
1.4 Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja.....	2
1.5 Batasan Variabel.....	2
1.6 Panduan Penilaian	4
1.7 Kompetensi Kunci.....	6
BAB II TAHAPAN BELAJAR	7
BAB III TUGAS TEORI DAN UNJUK KERJA	8
3.1 Tugas Tertulis	8
3.2 Lembar Tugas Unjuk Kerja.....	10
3.3 Daftar Cek Unjuk Kerja	15

BAB I

STANDAR KOMPETENSI

- 1.1 KODE UNIT** : F45.PW02.001.01
- 1.2 JUDUL UNIT** : Identifikasi Dan Penerapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah Dan Kota
- 1.3 DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

1.4 ELEMEN KOMPETENSI DAN KRITERIA UNJUK KERJA

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan berhubungan dengan perencanaan	1.1 Peraturan perundang-undangan terkait diidentifikasi. 1.2 Kriteria pasal terkait diuraikan 1.3 Pasal-pasal terkait dipilih. 1.4 Pasal-pasal yang terkait diuraikan.
2. Kriteria pasal terkait diuraikan	2.1 Dapat menjelaskan kriteria apa saja yang menjadikan suatu pasal terkait dengan isu perencanaan yang ada 2.2 Mampu menunjukkan bahwa kriteria yang dipilih terkait dengan perencanaan 2.3 Teliti dalam menguraikan kriteria pasal terkait
3. Melakukan identifikasi norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK)	3.1 NSPK terkait diidentifikasi. 3.2 NSPK terkait dipilih. 3.3 NSPK terkait diuraikan.
4. Merangkum peraturan perundangan dan NSPK terkait	4.1 Peraturan perundangan terkait disimpulkan. 4.2 NSPK terkait disimpulkan. 4.3 Peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait dirangkum.

1.5 BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan digunakan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan NSPK yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota,

- 1.2 Unit kompetensi ini sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota,
- 1.3 Peraturan perundangan yang diidentifikasi meliputi:
 - 1.3.1. Kebijakan penataan ruang terkait
 - 1.3.2. Kebijakan sektoral terkait
- 1.4 NSPK yang diidentifikasi meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam perencana tata ruang wilayah dan kota

2. Perlengkapan yang diperlukan

- 1) Media penyimpanan data (Komputer),
- 2) Media pencetakan (*printer*),
- 3) Media akses data (internet).

3. Tugas-tugas yang harus dilakukan

- 3.1 Melakukan identifikasi peraturan perundangan berhubungan dengan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota
- 3.2 Melakukan identifikasi norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) yang berhubungan dengan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota
- 3.3 Merangkum peraturan perundangan dan NSPK terkait

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

- 4.1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
- 4.2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi,
- 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,
- 4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
- 4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang,
- 4.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Beserta Rencana Rincinya,

- 4.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
- 4.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang.

1.6 PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Pengujian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen. Pengujian dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau secara simulasi pada kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai standar.

Metode uji yang digunakan adalah:

1. Ujian tertulis
2. Ujian lisan
3. Peragaan teknik di tempat kerja

2. Keterkaitan dengan unit lain

2.1 Unit kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya:

- 2.1.1. F45.PW01.001.01: Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- 2.1.2. F45.PW01.002.01: Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik

2.2 Kaitan dengan unit lain

- 2.2.1. F45.PW02.002.01: Menyiapkan Kebutuhan Data Perencanaan
- 2.2.2. F45.PW02.007.01: Melakukan survei primer dan sekunder
- 2.2.3. F45.PW02.010.01: Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- 2.2.4. F45.PW02.011.01: Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- 2.2.5. F45.PW02.012.01: Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- 2.2.6. F45.PW02.018.01: Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota

- 2.2.7. F45.PW02.021.01: Menyusun Rencana Parsial Sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota
- 2.2.8. F45.PW02.030.01: Menyusun Laporan Pekerjaan Perencanaan
- 2.2.9. F45.PW03.001.01: Menggunakan Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
- 2.2.10. F45.PW03.002.01: Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

- 3.1 Pengetahuan tentang ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota
- 3.2 Pengetahuan tentang NSPK perencanaan tata ruang wilayah dan kota.

4. Keterampilan yang dibutuhkan

- 4.1 Mampu dalam mengumpulkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait perencanaan tata ruang wilayah dan kota,
- 4.2 Mampu mengidentifikasi informasi mengenai peraturan perundang-undangan,
- 4.3 Mampu menjelaskan informasi mengenai peraturan perundang-undangan

5. Aspek Kritis yang harus diperhatikan

- 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam mengidentifikasi peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan isu perencanaan tata ruang wilayah dan kota
- 5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam mengidentifikasi norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) yang berhubungan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan kota
- 5.3 Ketaatan dan kecermatan dalam merangkum peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait

1.7 KOMPETENSI KUNCI

NO	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

BAB II

TAHAPAN BELAJAR

Langkah-langkah/tahapan belajar

- Penyajian bahan, pengajaran, peserta dan penilai harus yakin dapat memenuhi seluruh rincian yang tertuang dalam standar kompetensi.
- Isi pembelajaran merupakan kaitan antara kriteria unjuk kerja dengan pokok-pokok keterampilan dan pengetahuan serta sikap kerja yang dibutuhkan.
- Menginventarisasi peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi diklat profesi.
- Peserta harus mampu mendiskripsikan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk pengelolaan pelaksanaan pelatihan.
- Peserta dapat mengidentifikasi pasal-pasal yang berhubungan dengan pengelolaan pelaksanaan pelatihan
- Menginventarisasi peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan fungsi dan tugas manajer diklat profesi.
- Membuat daftar dan penyimpanan sarana dan prasarana pelatihan.
- Peserta dapat melayani kebutuhan peserta pelatihan akan sarana dan prasarana pelatihan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang terkait.
- Peserta dapat mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana pelatihan yang digunakan selama penyelenggaraan pelatihan.
- Peserta harus mampu mengevaluasi penerapan SKKNI, SLK, Materi Ajar, dan MUK dalam program pelatihan.
- Peserta harus mampu mengevaluasi penggunaan teknik dan metode pengajaran yang disampaikan oleh para instruktur dalam setiap sesi pelajaran.

BAB III

TUGAS TEORI DAN UNJUK KERJA

3.1 Tugas Teori

3.1.1 Tugas Tertulis 1

Tugas Teori I : Melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan berhubungan dengan perencanaan

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas: Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian: 30 Menit

Soal Tugas:

a. Jawaban Singkat

1. Sebutkan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan isu perencanaan yang ada (minimal 3 kategori peraturan)!

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Sebutkan peraturan perundangan yang terkait dengan pengembangan kota hijau!

.....
.....
.....
.....
.....

3. Sebutkan substansi dalam Undang-Undang No. 26 dan 27 yang mengatur tentang pengendalian pemanfaatan ruang!

.....
.....
.....
.....

b. Benar / Salah

4. B S Apakah UU No. 18/1999 terkait dengan penataan ruang? Sebutkan alasannya!

3.1.2 Tugas Tertulis II

Tugas Teori II : Melakukan identifikasi norma, standar, pedoman, dan Kriteria (NSPK)

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas: Jawablah 3 soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian: 30 Menit

Soal Tugas:

a. Jawaban Singkat

1. Menurut pendapat anda apa yang dimaksud dengan NSPK?
.....
.....
.....
.....
.....
2. Sebutkan NSPK terkait dengan isu perencanaan yang ada dirinci berdasarkan pendekatan sektoral (minimal 3 sektor)!
.....
.....
.....
.....
.....
3. Jelaskan alasan setiap pemilihan NSPK pada pertanyaan diatas dengan penataan ruang!
.....
.....
.....
.....
4. Jelaskan substansi dari salah satu pasal yang terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang!
.....
.....
.....

c. Benar / Salah

5. B S NSPK tidak diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan KSN kawasan perkotaan metropolitan

3.1.3 Tugas Tertulis III

Tugas Teori III : Merangkum peraturan perundangan dan NSPK terkait

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas: Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian: 30 menit

Soal Tugas:

a. Jawaban Singkat

1. Jelaskan hubungan pasal-pasal peraturan perundangan yang terkait dengan isu strategis yang telah anda pilih!

.....
.....
.....
.....
.....

2. Buatlah resume substansi pokok terkait dengan peraturan perundangan yang telah dipilih diatas!

.....
.....
.....
.....
.....

3. Jelaskan keterkaitan antara NSPK dalam isu strategis dengan peraturan perundangan yang lain!

.....
.....
.....
.....
.....

3.2 Lembar Tugas Unjuk Kerja

1. Nama Tugas I : Melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan berhubungan dengan perencanaan

2. Waktu Penyelesain Tugas I : 30 menit

3. Tujuan Pelatihan :

Setelah menyelesaikan tugas melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan berhubungan dengan perencanaan peserta mampu:

- a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait
- b. Menguraikan kriteria pasal terkait
- c. Memilih pasal-pasal terkait
- d. Menguraikan pasal-pasal yang terkait

1. Nama Tugas II : Melakukan identifikasi norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK)

2. Waktu Penyelesaian Tugas II : 30 menit

3. Tujuan Pelatihan :

Setelah menyelesaikan tugas melakukan identifikasi norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) peserta mampu:

- a. Mengidentifikasi NSPK terkait
- b. Memilih NSPK terkait
- c. Menguraikan NSPK terkait

1. Nama Tugas III : Merangkum peraturan perundangan dan NSPK terkait

2. Waktu Penyelesaian Tugas III : 30 menit

3. Tujuan Pelatihan :

Setelah menyelesaikan tugas merangkum peraturan perundangan dan NSPK terkait peserta mampu:

- a. Menyimpulkan peraturan perundangan terkait
- b. Menyimpulkan NSPK terkait
- c. Merangkum peraturan perundang-undangan dan NSPK terkait

2. Daftar peralatan dan Bahan:

NO.	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	KETERANGAN
A.	ALAT		
1.	Komputer/ notebook	Sesuai standar yang berlaku	Untuk praktek
2.	Projector	Sesuai standar yang berlaku	Setiap kelompok
3.	Papan tulis (black	Sesuai standar yang berlaku	Untuk satu kelas

NO.	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	KETERANGAN
	<i>board</i> dan atau <i>white board</i>)		
4.	<i>Clip board</i>	10	Untuk satu kelas
5.	Spidol whiteboard	Hitam, biru dan merah	Untuk satu kelas
B.	BAHAN/ BUKU WAJIB		
1.	Buku peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (Perda)	Sesuai standar yang berlaku	Untuk satu orang
2.	Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang	Sesuai standar yang berlaku	Untuk satu orang
3.	Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RTR KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait)	Dokumen terkini/ terbaru	Untuk satu orang
4.	Buku profil wilayah perencanaan meliputi wilayah administrasi dan geografis, iklim dan hidro oseanografi, geologi dan geomorfologi, ekosistem, sumberdaya, demografi dan sosial budaya	Buku profil terkini/ terbaru	Untuk satu orang
5.	Buku Tata Ruang Wilayah dan Kota	Text book (yang masih relevan/ paradigma terbaru)	Untuk satu orang
6.	Buku dan kajian mengenai data dan informasi di wilayah perencanaan	Text book (yang masih relevan/ paradigma terbaru)	Untuk satu orang
7.	Buku dan kajian mengenai daya dukung lingkungan	Text book (yang masih relevan/ paradigma terbaru)	Untuk satu orang

NO.	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	KETERANGAN
	dan perencanaan		
8.	Buku dan kajian konservasi dan bencana di wilayah perencanaan	Text book (yang masih relevan/ paradigma terbaru)	Untuk satu orang
9.	Buku dan kajian kewenangan dan pengelolaan di wilayah perencanaan	Text book (yang masih relevan/ paradigma terbaru)	Untuk satu orang

a. Indikator Unjuk Kerja

- a. Mampu menghubungkan suatu Peraturan Perundang-undangan dengan isu yang ada
- b. Mampu menghubungkan pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dengan isu yang ada
- c. Mampu mengelompokkan pasal-pasal sesuai dengan kebutuhan perencanaan
- d. Mampu menghubungkan suatu NSPK dengan isu yang ada dengan tepat secara cermat
- e. Mampu menghubungkan NSPK terpilih dengan isu yang ada
- f. Mampu mengelompokkan NSPK yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan perencanaan
- g. Mampu menyusun ikhtisar dari pasal-pasal atau Peraturan Perundang-undangan yang telah dipilih
- h. Mampu menyusun ikhtisar dari NSPK yang telah dipilih
- i. Mampu menunjukkan keterkaitan pokok-pokok Peraturan Perundang-undangan dan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan

b. Standar Kinerja

- a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
- b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu:

- a. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja.
 - b. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidaksiplinan, ketidaktelitian, ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
 - c. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yang telah ditetapkan.
- d. Instruksi kerja
- a. Hubungkan suatu Peraturan Perundang-undangan dengan isu yang ada
 - b. Hubungkan suatu NSPK dengan isu yang ada dengan tepat secara cermat
 - c. Hubungkan NSPK terpilih dengan isu yang ada
 - d. Kelompokkan NSPK yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan perencanaan
 - e. Susun ikhtisar dari pasal-pasal atau Peraturan Perundang-undangan yang telah dipilih
 - f. Susun ikhtisar dari NSPK yang telah dipilih
 - b. Tunjukkan keterkaitan pokok-pokok Peraturan Perundang-undangan dan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan
- e. Langkah kerja
- a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
 - b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.
 - c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
 - d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
 - e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.

- f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).

3.3 Daftar Cek Unjuk Kerja

NO.	DAFTAR TUGAS/ INSTRUKSI	POIN YANG DICEK	PENCAPAIAN		PENILAIAN	
			YA	TIDAK	K	BK
1.	Hubungkan suatu peraturan perundang-undangan dengan isu yang ada	Keterkaitan suatu peraturan perundang-undangan dengan isu yang ada				
2.	Hubungkan pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dengan isu yang ada	Keterkaitan pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dengan isu yang ada				
3.	Kelompokan pasal-pasal sesuai dengan kebutuhan perencanaan	Pengelompokkan pasal-pasal sesuai dengan kebutuhan perencanaan				
4.	Hubungkan suatu NSPK dengan isu yang ada dengan tepat secara cermat	Keterkaitan NSPK dengan isu yang ada				
5.	Hubungkan NSPK terpilih dengan isu yang ada	Keterkaitan NSPK terpilih dengan isu yang ada				
6.	Kelompokan NSPK yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan perencanaan	Pengelompokkan NSPK yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan perencanaan				
7.	Susun ikhtisar dari pasal-pasal atau Peraturan Perundang-undangan yang telah dipilih	ikhtisar dari pasal-pasal atau Peraturan Perundang-undangan				
8.	Tunjukkan keterkaitan pokok-pokok Peraturan Perundang-undangan dan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan	pokok-pokok Peraturan Perundang-undangan dan NSPK sesuai dengan kebutuhan perencanaan				

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA

TIDAK

	NAMA	TANDA TANGAN
PESERTA
PENILAI

Catatan Penilai :